DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

PERKEMBANGAN SIBER DAN DOMINASI TEKNOLOGI MILITER CHINA DALAM GEOPOLITIK DI KAWASAN

Raden Kresna Effendy [1]

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This research examines the development of cyber capabilities and China's dominance in military technology within the geopolitical dynamics of the Indo-Pacific region. Using the theoretical approaches of realism, Power Transition Theory, Security Dilemma, as well as the concepts of hegemony and Security Complex Theory, this study analyzes China's cyber warfare strategies and the implications of its technological dominance on regional security stability. The findings reveal that China employs cyber warfare strategies, including hacking operations, espionage, disinformation, and digital media manipulation, to strengthen its influence. China's military technological dominance has also triggered responses from regional states, escalating geopolitical tensions and accelerating the arms race. Alliances such as the Quad and AUKUS have emerged as countermeasures against this growing influence. In conclusion, without effective de-escalation mechanisms, China's technological dominance poses a risk of increasing conflict. Therefore, more adaptive diplomatic strategies and security cooperation are needed to maintain stability in the Indo-Pacific region.

Keywords: Cyber Warfare, Military Technology, China, Geopolitics, Regional Security

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang perkembangan siber dan dominasi teknologi militer China dalam dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Dengan menggunakan pendekatan teori realisme, Power Transition Theory, Security Dilemma, serta konsep hegemoni dan Security Complex Theory, penelitian ini menganalisis strategi perang siber China serta implikasi dominasi teknologinya terhadap stabilitas keamanan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa China menerapkan strategi perang siber yang mencakup operasi peretasan, spionase, disinformasi, dan manipulasi media digital untuk memperkuat pengaruhnya. Dominasi teknologi militer China juga memicu respons dari negara-negara di kawasan, meningkatkan ketegangan geopolitik, dan mempercepat perlombaan senjata. Aliansi seperti Quad dan AUKUS menjadi bentuk adaptasi negara-negara pesaing dalam menghadapi ancaman ini. Kesimpulannya, tanpa mekanisme de-eskalasi yang efektif, dominasi teknologi China berpotensi meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi dan kerja sama keamanan yang lebih adaptif untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Perang Siber, Teknologi Militer, China, Geopolitik, Keamanan Regional

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

PENDAHULUAN

Internet dapat dianggap sebagai salah satu inovasi paling revolusioner dalam sejarah modern. Kehadirannya telah memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil dan, yang lebih penting, telah menjadikan dunia kita lebih terhubung dari sebelumnya. Sejak munculnya internet, hampir setiap aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hubungan diplomatik antarnegara. Selain itu, internet juga berperan dalam mengubah dinamika peperangan, menciptakan dimensi baru dalam pertahanan dan keamanan global (Steven Feldstein, 2022). Untuk menghadapi perubahan besar ini, negara-negara di seluruh dunia telah berlomba-lomba memperkuat kapabilitas siber mereka guna tetap kompetitif di kancah internasional. Beberapa negara adidaya telah menginvestasikan sumber daya yang besar dalam pengembangan sistem teknologi canggih, sementara negara-negara lain yang memiliki keterbatasan dana dan keahlian masih tertinggal dalam perlombaan ini. Salah satu negara yang menarik untuk dikaji adalah Tiongkok (Lyu Jinghua, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah meningkatnya peran China dalam perang siber dan teknologi militer. China tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global, tetapi juga secara agresif mengembangkan kapabilitas siber dan militernya untuk memperluas pengaruh di kawasan tersebut. Persaingan geopolitik antara China dan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara ASEAN, semakin mengarah pada rivalitas dalam ranah digital dan militer.

National Institute of Standards and Technology (NIST) dari Amerika Serikat mendefinisikan serangan siber sebagai segala bentuk aktivitas berbahaya yang bertujuan untuk mengakses, mengganggu, menolak, merusak, atau bahkan menghancurkan sistem informasi maupun data yang tersimpan di dalamnya (Peter Harrell, 2025).

Ada beberapa bentuk serangan siber yang paling umum dan sering terjadi. Pertama, pencurian data, di mana peretas mengakses dan mencuri informasi sensitif dari sistem tertentu. Data yang dicuri ini dapat diperjualbelikan, dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen, atau bahkan digunakan untuk pemerasan. Kedua, destabilisasi, yaitu serangan langsung terhadap pemerintah atau infrastruktur suatu negara dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketiga, gangguan ekonomi, di mana bank, perusahaan keuangan, atau lembaga bisnis menjadi target untuk pencurian dana maupun manipulasi sistem ekonomi.

Keempat, serangan propaganda, yaitu upaya memanipulasi opini publik di negara lain dengan menyebarkan disinformasi atau narasi tertentu yang dapat memengaruhi kebijakan dan perilaku masyarakat. Terakhir, sabotase, yang sering kali berkaitan dengan peperangan konvensional maupun non-konvensional.

Meningkatnya aktivitas siber China menimbulkan tantangan baru dalam keamanan regional. Pada tahun 2023, berbagai laporan mengungkapkan bahwa China diduga berada di balik serangkaian serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis di berbagai negara, termasuk Vietnam, Indonesia, dan Taiwan (UNAV, 2023). Selain itu, Taiwan tetap menjadi fokus utama bagi para peretas China karena kepentingan strategisnya dalam kebijakan "Satu China".

Dalam Bab III dari *Buku Putih Pertahanan Nasional Tiongkok tahun 2004*, yang

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

berjudul *Revolusi dalam Urusan Militer dengan Karakteristik Tiongkok*, otoritas Tiongkok secara terbuka menyatakan ambisi mereka untuk mengembangkan persenjataan berteknologi tinggi. Tidak hanya sekadar meningkatkan kapasitas militer, mereka juga mengumumkan rencana strategis untuk merekrut serta melibatkan individu-individu paling berbakat di negara itu dalam pengembangan sistem pertahanan berbasis teknologi canggih (China People's Liberation Army, 2004).

Meningkatnya aktivitas siber dan ekspansi militer China menimbulkan beberapa permasalahan utama. Pertama, munculnya ancaman terhadap kedaulatan digital negara-negara di Indo-Pasifik. Serangan siber yang dilakukan China diduga bertujuan untuk memperoleh informasi strategis, mengganggu stabilitas politik, serta memperlemah posisi ekonomi negara-negara target. Kedua, adanya potensi eskalasi konflik di Laut China Selatan akibat dominasi militer China. Persaingan antara China dan Amerika Serikat semakin memanas, dan ini dapat berdampak pada negara-negara di kawasan yang memiliki hubungan erat dengan kedua kekuatan besar tersebut. Selain itu, tantangan dalam regulasi internasional mengenai perang siber masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Saat ini, belum ada norma yang secara jelas mengatur bagaimana negara harus bertindak dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas. Hal ini membuka celah bagi negara-negara untuk menggunakan perang siber sebagai alat politik dan ekonomi.

Selain itu, Cina telah mengembangkan beberapa cara untuk menghindari menjadi target serangan siber. Terlepas dari kemampuan teknis dan teknologi yang dapat dikumpulkannya, para pemimpin Tiongkok juga khawatir tentang perselisihan hukum dan urusan yang dapat mereka hadapi untuk melemahkan kemungkinan diretas atau dimata-matai. Salah satu inisiatif ini adalah Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok yang diberlakukan pada tahun 2017, memberikan kerangka kerja peraturan dan kewajiban tertentu untuk penggunaan data, yang juga diterapkan secara ketat untuk perusahaan asing yang bekerja di Tiongkok. Selain itu, pada bulan Maret 2023, pemerintah Tiongkok menerbitkan buku putih, 'Tata Kelola Dunia Maya Berbasis Hukum Tiongkok di Era Baru', di mana Tiongkok mengusulkan kerangka kerja peraturan internasional tentang topik keamanan siber (Universidad de Navarra, 2023).

Dalam konteks realitas yang ada, China telah berhasil membangun kapabilitas siber dan militer yang mumpuni serta memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik (Publikasi Ilmiah UNWAHAS, 2023). China secara aktif mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI), jaringan 5G, dan persenjataan canggih untuk memperkuat dominasinya.

Untuk menganalisis fenomena ini, teori Geopolitik Klasik dapat diterapkan. Teori ini menekankan pentingnya faktor geografis dan kekuatan militer dalam menentukan dominasi global. Menurut teori ini, negara dengan penguasaan wilayah strategis akan memiliki keuntungan dalam persaingan global. Dalam hal ini, Laut China Selatan menjadi area kunci dalam strategi geopolitik China. Selain itu, teori Kompleks Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory*) juga relevan untuk memahami bagaimana keamanan di Indo-Pasifik saling berhubungan (Buzan, B., & Waever, O, 2003). Teori ini menjelaskan bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika keamanan di kawasan sekitarnya

KERANGKA ANALITIK

Pendekatan realisme merupakan salah satu teori utama dalam studi hubungan internasional. Pendekatan ini menekankan pada aspek kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama yang menggerakkan interaksi antarnegara. Realisme berakar pada

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

pemikiran bahwa dunia adalah arena konflik dan persaingan, di mana setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan sendiri demi bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarkis.

Sejarah realisme dapat ditelusuri sejak zaman kuno, dengan Thucydides sebagai salah satu pemikir awal yang menuliskan bagaimana dinamika kekuasaan mempengaruhi hubungan antarnegara dalam Perang Peloponnesian. Pemikiran ini kemudian diteruskan oleh Niccolò Machiavelli, yang dalam karyanya *The Prince* menggambarkan pentingnya kelicikan dan kekuasaan dalam mempertahankan negara (Machiavelli, N).

Pemikir lainnya, Thomas Hobbes, dalam *Leviathan*, mengembangkan gagasan bahwa dalam kondisi tanpa pemerintahan yang kuat, manusia akan berada dalam keadaan perang semua melawan semua, sebuah prinsip yang kemudian diterapkan dalam analisis hubungan internasional (Hobbes, T).

Pada abad ke-20, realisme berkembang menjadi teori yang lebih sistematis dengan karya-karya seperti *Politics Among Nations* oleh Hans Morgenthau. Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional harus selalu didefinisikan dalam istilah kekuasaan, dan bahwa politik internasional adalah perjuangan terus-menerus untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan. Morgenthau menolak pendekatan normatif yang mencoba membangun tatanan dunia berdasarkan prinsip moralitas universal dan menegaskan bahwa hubungan internasional lebih dipengaruhi oleh faktor rasional dan kalkulatif (Morgenthau, H. J, 1948).

Realisme kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut melalui pemikiran Kenneth Waltz yang memperkenalkan neorealisme atau realisme struktural. Dalam *Theory of International Politics*, Waltz menegaskan bahwa bukan hanya sifat manusia atau keinginan negara individu yang menentukan perilaku dalam sistem internasional, tetapi struktur sistem internasional itu sendiri. Dengan kata lain, anarki dalam sistem internasional memaksa negara-negara untuk bertindak dengan cara tertentu demi bertahan hidup (Waltz, K. N, 1979).

Perkembangan lebih lanjut dari realisme juga terjadi dengan munculnya realisme ofensif yang dikembangkan oleh John Mearsheimer. Dalam *The Tragedy of Great Power Politics*, Mearsheimer berargumen bahwa negara-negara tidak hanya berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi juga secara aktif berusaha meningkatkan kekuatan mereka untuk mencapai dominasi (Mearsheimer, J. J, 2001).

Pendekatan realisme tetap menjadi perspektif dominan dalam studi hubungan internasional karena kemampuannya dalam menjelaskan berbagai dinamika geopolitik, konflik, dan persaingan kekuatan yang terjadi sepanjang sejarah.

Dalam konteks modern, pendekatan realisme juga dapat diterapkan dalam analisis perkembangan teknologi siber dan dominasi teknologi militer China dalam geopolitik kawasan. Sebagai negara dengan ambisi global, China menggunakan strategi realistis dalam memperkuat kemampuan siber dan militernya sebagai alat untuk menegaskan kekuatan serta mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dominasi teknologi ini tidak hanya menciptakan keseimbangan kekuatan baru tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan negara-negara pesaing seperti Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama memperoleh

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dikaji. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menyajikan data secara deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih rinci dan dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terfokus (*focused interview*), di mana peneliti berinteraksi secara langsung dan melakukan pertemuan tatap muka dengan informan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Perkembangan Siber dan Dominasi Teknologi Militer China dalam Geopolitik di Kawasan.

PEMBAHASAN

A. Strategi Perang Siber yang Diterapkan oleh China dalam Upaya Meningkatkan Pengaruhnya di Kawasan Indo-Pasifik

Guna memahami strategi perang siber yang diterapkan oleh China dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, perlu melihatnya dari berbagai perspektif teoritis yang relevan dalam studi hubungan internasional. Pendekatan realisme, Teori Kebangkitan Kekuatan (*Power Transition Theory*), serta konsep hegemoni merupakan pendekatan dan teori yang peneliti gunakan untuk memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis motivasi dan implikasi dari strategi siber China.

Realisme, sebagai salah satu teori utama dalam hubungan internasional, menekankan pada kepentingan nasional dan persaingan antarnegara dalam mencapai dominasi. Hans Morgenthau berargumen bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka yang sering kali berkaitan dengan peningkatan kekuatan dan keamanan. Dalam konteks perang siber, strategi China dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat posisinya dalam lanskap geopolitik serta mengurangi potensi ancaman dari negara-negara pesaing, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik. Perang siber menjadi alat yang efektif bagi China untuk memperoleh keunggulan tanpa harus terlibat dalam konflik militer konvensional. Dengan mengembangkan kapabilitas siber yang semakin canggih, China dapat mengakses informasi strategis, melemahkan infrastruktur lawan, serta membentuk opini publik di berbagai negara untuk kepentingannya.

Dalam perspektif Teori Kebangkitan Kekuatan yang dikembangkan oleh A.F.K. Organski, perubahan keseimbangan kekuatan global sering kali membawa ketegangan dan potensi konflik antara negara yang sedang bangkit dengan negara yang berusaha mempertahankan status quo. Dalam konteks ini, China adalah kekuatan yang sedang menanjak dan berusaha menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Perang siber menjadi instrumen penting dalam mempercepat transisi kekuatan ini dengan cara merusak keunggulan teknologi dan ekonomi lawan. Melalui operasi peretasan dan pencurian data dari berbagai perusahaan serta institusi pemerintah, China memperoleh keuntungan strategis yang signifikan, mempercepat kebangkitannya sebagai kekuatan global. Selain itu, disinformasi dan propaganda digital digunakan untuk melemahkan legitimasi negara-negara rival serta membangun narasi yang menguntungkan bagi kepentingan geopolitik China.

Konsep hegemoni dalam hubungan internasional juga memberikan wawasan penting dalam memahami bagaimana China menggunakan perang siber sebagai bagian dari strategi

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

globalnya. Robert Keohane berpendapat bahwa hegemoni dapat beroperasi melalui kendali terhadap institusi dan aturan internasional. Dalam konteks perang siber, China berupaya menciptakan hegemoni digital dengan mengendalikan infrastruktur komunikasi global melalui inisiatif seperti *Digital Silk Road* serta dominasi perusahaan teknologi seperti Huawei dan Alibaba. Upaya ini memungkinkan China untuk mempengaruhi standar teknologi global, memastikan bahwa negara-negara mitranya bergantung pada teknologi China, dan secara tidak langsung meningkatkan kontrolnya atas arus informasi. Selain itu, perang siber juga digunakan untuk menekan perlawanan terhadap dominasi China di kawasan, baik melalui serangan terhadap infrastruktur digital lawan maupun kampanye propaganda yang bertujuan membentuk citra positif bagi kepemimpinan Beijing.

Dari analisis terhadap strategi perang siber yang diterapkan oleh China, tampak bahwa pendekatan ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya ancaman terhadap keamanan siber di kawasan. China secara aktif melakukan operasi peretasan terhadap berbagai institusi pemerintah dan sektor swasta di negara-negara Indo-Pasifik, yang mencakup pencurian data strategis, sabotase infrastruktur digital, serta pengumpulan informasi intelijen. Dalam beberapa kasus, serangan siber yang dilakukan China telah menyebabkan gangguan terhadap jaringan komunikasi dan sistem kritis di negara-negara yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingannya.

Selain itu, perang siber juga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi di kawasan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, China mampu memanipulasi opini publik melalui kampanye disinformasi dan propaganda daring. Strategi ini digunakan untuk mendukung kandidat politik atau kelompok yang pro-China di berbagai negara serta melemahkan oposisi yang menentang kebijakan Beijing. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, terutama dalam persaingan bisnis global di industri teknologi dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan China yang didukung oleh pemerintah memiliki akses ke informasi dan teknologi yang diperoleh melalui operasi peretasan, memberikan mereka keunggulan dalam persaingan global.

Namun, strategi perang siber China juga menimbulkan respons yang semakin kuat dari negara-negara yang merasa terancam oleh ekspansi digital Beijing. Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India, misalnya, telah memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan siber melalui inisiatif seperti Quad dan aliansi teknologi. Negara-negara ini juga berusaha mengembangkan alternatif terhadap infrastruktur digital China untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi yang dikendalikan Beijing. Respons ini menunjukkan bahwa meskipun perang siber memberikan keuntungan bagi China, ia juga memicu perlawanan dari negara-negara pesaing, yang berupaya untuk membatasi pengaruhnya dalam lanskap digital global.

Dinamika ini menunjukkan bagaimana perang siber menjadi elemen penting dalam perubahan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. China menggunakan strategi ini untuk menekan dominasi Amerika Serikat dan membangun pengaruhnya di negara-negara berkembang melalui diplomasi digital dan ekonomi. Namun, pendekatan agresif dalam perang siber juga berisiko memicu eskalasi konflik dan memperburuk hubungan internasional. Dalam jangka panjang, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada bagaimana China menavigasi resistensi dari negara-negara pesaing serta menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Dengan demikian, perang siber tidak hanya menjadi alat untuk memperkuat

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

dominasi China, tetapi juga faktor yang dapat menentukan arah keamanan dan geopolitik kawasan Indo-Pasifik di masa depan.

B. Implikasi Dominasi Teknologi Militer China Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik

Dominasi teknologi militer China di kawasan Indo-Pasifik memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan regional. Untuk memahami implikasi dari fenomena ini, tiga pendekatan teoretis digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis, yaitu Teori *Security Dilemma*, Konsep Hegemoni, dan Teori Keamanan Kompleks (*Security Complex Theory*). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana dominasi militer China membentuk dinamika keamanan di kawasan.

Teori *Security Dilemma* yang dikemukakan oleh John Herz dan Robert Jervis menjelaskan bagaimana upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dapat memicu ketidakstabilan. Dalam konteks ini, modernisasi teknologi militer China—termasuk pengembangan kecerdasan buatan dalam sistem persenjataan, peningkatan kapabilitas siber, serta pembangunan sistem persenjataan hipersonik—dapat dilihat sebagai langkah defensif oleh Beijing. Namun, negara-negara lain di kawasan seperti Jepang, India, Australia, dan anggota ASEAN melihatnya sebagai ancaman potensial yang memicu respons strategis berupa peningkatan aliansi keamanan, peningkatan anggaran pertahanan, serta pengembangan teknologi militer mereka sendiri. Situasi ini menciptakan spiral ketidakpercayaan yang berujung pada perlombaan senjata di kawasan, yang pada akhirnya memperbesar risiko konflik yang tidak disengaja.

Sementara itu, konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dan diperluas oleh Robert Keohane dapat digunakan untuk memahami bagaimana dominasi militer China berperan dalam mengkonsolidasikan pengaruhnya di kawasan. Hegemoni tidak hanya terbentuk melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kontrol terhadap ekonomi dan teknologi. China memanfaatkan dominasi teknologinya untuk memperkuat posisi hegemoniknya di Indo-Pasifik, antara lain dengan membangun ketergantungan negara-negara lain terhadap sistem persenjataan dan infrastruktur teknologi yang mereka kembangkan. Misalnya, proyek *Digital Silk Road* dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) tidak hanya berfungsi sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan sistem keamanan siber negara-negara mitra dengan infrastruktur teknologi yang dikuasai China. Dengan demikian, China dapat menciptakan ekosistem strategis di mana negara-negara mitranya sulit melepaskan diri dari pengaruh Beijing.

Selain itu, Teori Keamanan Kompleks (*Security Complex Theory*) yang diperkenalkan oleh Barry Buzan memberikan perspektif mengenai bagaimana keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara lain di sekitarnya. Dalam konteks Indo-Pasifik, peningkatan teknologi militer China tidak hanya berimplikasi pada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, tetapi juga berdampak pada konfigurasi keamanan kawasan secara keseluruhan. Negara-negara di kawasan ini semakin melihat keamanan mereka sebagai bagian dari sistem yang saling terkait, sehingga muncul pola interaksi keamanan yang lebih kompleks. Aliansi seperti Quad (AS, India, Jepang, Australia) dan AUKUS (AS, Inggris, Australia) dapat dilihat sebagai respons terhadap dominasi militer China, yang menciptakan blok-blok

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

keamanan yang berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik.

Dalam praktiknya, dominasi teknologi militer China menciptakan berbagai implikasi yang memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Salah satunya adalah peningkatan aktivitas militer di Laut China Selatan, di mana China mengadopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan sistem pengawasan berbasis drone untuk memperkuat klaim teritorialnya. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari negara-negara lain yang juga memiliki klaim di wilayah tersebut, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Selain itu, peningkatan kemampuan siber China menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis negara-negara tetangganya, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan perang siber sebagai bagian dari strategi konflik asimetris di masa depan. Di sisi lain, dominasi teknologi militer China juga berkontribusi terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan global. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi aktor dominan dalam sistem keamanan Indo-Pasifik, mulai menghadapi tantangan dari Beijing yang semakin berani menantang supremasi militer Washington di kawasan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada dinamika militer, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan diplomasi di Indo-Pasifik. Negara-negara yang berada di bawah tekanan dari kedua kekuatan ini harus menavigasi kebijakan luar negeri mereka dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara dua kekuatan besar ini.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan dominasi teknologi militer China kemungkinan besar akan mempercepat multipolaritas di kawasan Indo-Pasifik, dengan lebih banyak negara yang mencoba mengembangkan kapabilitas militer dan sibernya sendiri untuk mengimbangi pengaruh Beijing. Namun, tanpa adanya mekanisme kepercayaan dan dialog strategis yang efektif, risiko eskalasi konflik akan tetap tinggi. Oleh karena itu, pendekatan diplomatik yang berorientasi pada de-eskalasi perlu dikembangkan untuk mencegah ketegangan yang dapat berujung pada konflik berskala besar. Dengan memahami dinamika ini melalui perspektif teori hubungan internasional, dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik dapat dikelola dalam menghadapi dominasi teknologi militer China.

KESIMPULAN

China menerapkan strategi perang siber yang terintegrasi dengan pendekatan militer dan geopolitik untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini mencakup operasi peretasan, spionase siber, disinformasi, serta manipulasi media digital guna melemahkan lawan dan membentuk narasi yang menguntungkan bagi Beijing. Dengan mengembangkan kapabilitas siber yang canggih, China tidak hanya mampu mencuri data strategis dari negara-negara pesaing, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi hegemoniknya melalui inisiatif seperti *Digital Silk Road* dalam *Belt and Road Initiative* (BRI). Pendekatan ini memungkinkan China untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya tanpa harus terlibat dalam konfrontasi militer langsung.

Lebih lanjut, dominasi teknologi militer China berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dari perspektif Security Dilemma, modernisasi militer dan siber China memicu respons strategis dari negara-negara lain, yang meningkatkan perlombaan senjata dan memperburuk ketegangan geopolitik. Dengan menggunakan konsep hegemoni, China menciptakan ketergantungan negara-negara mitra pada teknologi dan sistem pertahanannya,

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

yang memperkuat posisinya di kawasan. Sementara itu, Teori Keamanan Kompleks menunjukkan bahwa respons dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia terhadap kebangkitan militer China telah membentuk blok-blok keamanan baru seperti Quad dan AUKUS, yang berpotensi meningkatkan fragmentasi kawasan. Jika tidak dikelola dengan baik melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama keamanan yang efektif, dominasi teknologi militer China dapat meningkatkan risiko konflik serta mengganggu stabilitas jangka panjang di Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.

China People's Liberation Army, 2004. China White Paper. Diakses melalui: http://www.china.org.cn/e-white/20041227/III.htm#5

Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke.

Lyu Jinghua, 2022. What Are China's Cyber Capabilities and Intentions. Diakses melalui: https://carnegieendowment.org/posts/2019/04/what-are-chinas-cyber-capabilities-and-intentions?lang=en

Machiavelli, N. (1532). *The Prince*. Florence: Antonio Blado d'Asola.

Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton & Company.

Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.

Peter Harrell, 2025. Managing the Risks of China's Access to U.S. Data and Control of Software and Connected Technology. Diakses melalui: https://carnegieendowment.org/research/2025/01/managing-the-risks-of-chinas-access-to-us-data-and-control-of-software-and-connected-technology?lang=en

Publikasi Ilmiah UNWAHAS. (2023). *Analisis Strategi Keamanan Siber China di Kawasan Indo-Pasifik*. Diakses melalui: https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Steven Feldstein, 2022. Disentangling The Digital Battlefield: How the Internet Has Changed

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 2 Tahun 2025 Hal. 425-434
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i2.4622

Article History:
Submitted: Sept 18, 2025
Accepted: Sept 29, 2025
Published: Okt 03, 2025

War. Diakses melalui: https://warontherocks.com/2022/12/disentangling-the-digital-battlefield-how-the-internet-has-changed-war/

UNAV. (2023). Chinese Cyber Warfare in the Indo-Pacific. University of Navarra. Diakses melalui: https://www.unav.edu/web/global-affairs

Universidad de Navarra, 2023. Chinese Cyber Warfare in the Indo-Pacific: An analysis of means, targets, and solutions. Diakses melalui: https://www.unav.edu/web/global-affairs/chinese-cyber-warfare-in-the-indo-pacific

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.